

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38 Tanjungpinang

www.kepri.litbang.pertanian.go.id

Telp; 0771 22153

KATA PENGANTAR

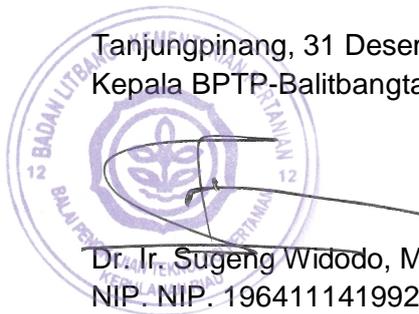
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjungpinang, 31 Desember 2019
Kepala BPTP-Balitbangtan Kepri,



Dr. Ir. Sugeng Widodo, MP
NIP. NIP. 196411141992031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

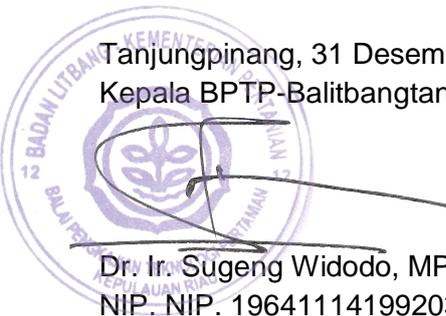
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Desember 2019
Kepala BPTP-Balitbangtan Kepri,



Dr. Ir. Sugeng Widodo, MP
NIP. NIP. 196411141992031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp720.024,00 atau mencapai 9,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp8.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp5.530.170.465,00 atau mencapai 94,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.869.273.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.288.572.227,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp25.494.200,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.260.966.777,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.111.250,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.590.608,00 dan Rp14.286.981.619,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp350.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.240.376.127,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.240.026.127,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-604.976,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.240.631.103,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp13.921.037.481,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.240.631.103,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.606.575.241,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp14.286.981.619,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	8.000.000,00	720.024,00	9,00	10.500.000,00
Jumlah Pendapatan		8.000.000,00	720.024,00	9,00	10.500.000,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1.833.014.000,00	1.818.608.792,00	99,21	1.613.077.482,00
Belanja Barang	B.4.	3.071.259.000,00	2.756.250.136,00	89,74	3.565.845.873,00
Belanja Modal	B.5.	965.000.000,00	955.311.537,00	99,00	494.701.750,00
Jumlah Belanja		5.869.273.000,00	5.530.170.465,00	94,22	5.673.625.105,00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	25.494.200,00	22.128.300,00
Jumlah Aset Lancar		25.494.200,00	22.128.300,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	4.568.076.000,00	4.568.076.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	3.992.659.580,00	2.960.223.243,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	8.556.368.860,00	8.556.368.860,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	47.232.825,00	47.232.825,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	22.280.000,00	22.280.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-2.925.650.488,00	-2.257.179.147,00
Jumlah Aset Tetap		14.260.966.777,00	13.897.001.781,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	11.260.000,00	11.260.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-15.263.750,00	-12.327.500,00
Jumlah Aset Lainnya		2.111.250,00	5.047.500,00
Jumlah Aset		14.288.572.227,00	13.924.177.581,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	1.590.608,00	3.140.100,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.590.608,00	3.140.100,00
Jumlah Kewajiban		1.590.608,00	3.140.100,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	14.286.981.619,00	13.921.037.481,00
Jumlah Ekuitas		14.286.981.619,00	13.921.037.481,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.288.572.227,00	13.924.177.581,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	350.000,00	10.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		350.000,00	10.500.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.818.508.700,00	1.608.998.082,00
Beban Persediaan	D.3.	544.685.100,00	954.384.550,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.133.349.737,00	1.430.035.642,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	175.431.732,00	180.415.008,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	896.993.267,00	1.026.479.473,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	671.407.591,00	583.828.277,00
JUMLAH BEBAN		5.240.376.127,00	5.784.141.032,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.240.026.127,00	-5.773.641.032,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	321.350.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	500.024,00	503.540.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	1.105.000,00	301.340.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-604.976,00	-119.150.000,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.240.631.103,00	-5.892.791.032,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	13.921.037.481,00	14.150.304.608,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-5.240.631.103,00	-5.892.791.032,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	398.800,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	398.800,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.606.575.241,00	5.663.125.105,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	14.286.981.619,00	13.921.037.481,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19/Permentan/OT.020/05/2017.

BPTP Kepulauan Riau merupakan fungsi unit kerja Eselon III yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Pejabat Eselon IV.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Menjadi suatu unit kerja Badan Litbang Pertanian penghasil inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang handal sesuai dengan dinamika pembangunan pertanian di Kepulauan Riau.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.350.000,00	6.350.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah Pendapatan	8.000.000,00	8.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.592.198.000,00	1.827.684.000,00
Belanja Lembur	10.660.000,00	5.330.000,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.007.000,00	0,00
Belanja Barang Operasional	486.128.000,00	497.128.000,00
Belanja Barang Non Operasional	711.910.000,00	582.576.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.413.968.000,00	628.356.000,00
Belanja Jasa	296.049.000,00	247.359.000,00
Belanja Pemeliharaan	207.300.000,00	202.590.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	630.400.000,00	913.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	965.000.000,00	965.000.000,00
Jumlah Belanja	6.339.620.000,00	5.869.273.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp720.024,00 atau mencapai 9,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.350.000,00	350.000,00	5,51
Pendapatan Lain-lain	0,00	370.024,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	1.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.000.000,00	720.024,00	9,00

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -93,14% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	350.000,00	10.500.000,00	- 96,67
Pendapatan Lain-lain	370.024,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	720.024,00	10.500.000,00	- 93,14

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp5.530.170.465,00 atau 94,22% dari anggaran belanja sebesar Rp5.869.273.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	1.833.014.000,00	1.818.610.802,00	99,21
Belanja Barang	3.071.259.000,00	2.756.250.136,00	89,74
Belanja Modal	965.000.000,00	955.311.537,00	99,00

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Total Belanja Kotor	5.869.273.000,00	5.530.172.475,00	94,22
Pengembalian Belanja		-2.010,00	0,00
Total Belanja	5.869.273.000,00	5.530.170.465,00	94,22

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -2,53% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Jumlah pagu lebih kecil dari pagu tahun sebelumnya yaitu dari Rp4.145.190.000 menjadi Rp3.071.259.000 dengan selisih Rp.1.073.931.000

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	1.818.608.792,00	1.613.077.482,00	12,74
Belanja Barang	2.756.250.136,00	3.565.845.873,00	-22,70
Belanja Modal	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11
Total Belanja	5.530.170.465,00	5.673.625.105,00	-2,53

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.818.608.792,00 dan Rp1.613.077.482,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,74% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 4 pegawai pada bulan Januari.
2. Terdapat penerimaan CPNS sebanyak 5 orang pada awal Februari 2019,
3. Terdapat KDP sebanyak 4 pegawai
4. Terdapat kenaikan pangkat sebanyak 6 pegawai
5. Terdapat pegawai menduduki jabatan fungsional 2 orang dan kenaikan jabatan fungsional 1 orang,
6. Perubahan status pegawai dari kawin 0 anak menjadi kawin 1 anak.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.818.610.802,00	1.607.126.983,00	13,16
Belanja Lembur	0,00	6.496.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.818.610.802,00	1.613.622.983,00	12,70
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.010,00	-545.501,00	-99,63
Jumlah Belanja	1.818.608.792,00	1.613.077.482,00	12,74

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.756.250.136,00 dan Rp3.565.845.873,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -22,70% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Jumlah pagu belanja tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 yaitu dari Rp4.145.190.000 menjadi Rp3.071.259.000 dengan selisih Rp.1.073.931.000.
2. Beban belanja pada tahun 2018 lebih tinggi sehingga realisasi tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019
3. Jumlah belanja untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian baik operasional, non operasional dan persediaan tidak begitu banyak, karena kegiatan 2019 sebahagian melanjutkan kegiatan tahun 2018.
4. Intensitas perjalanan dinas lebih sedikit, karena perjalanan keluar kota tidak banyak.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	491.145.122,00	482.788.827,00	1,73
Belanja Barang Non Operasional	441.141.741,00	731.907.409,00	-39,73
Belanja Barang Persediaan	551.658.000,00	930.285.850,00	-40,70
Belanja Jasa	202.512.274,00	214.671.306,00	-5,66
Belanja Pemeliharaan	172.799.732,00	179.713.008,00	-3,85
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	896.993.267,00	1.026.479.473,00	-12,61
Jumlah Belanja Kotor	2.756.250.136,00	3.565.845.873,00	-22,70
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.756.250.136,00	3.565.845.873,00	-22,70

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp955.311.537,00 dan Rp494.701.750,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 93,11% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Jumlah paket belanja modal pada tahun 2019 lebih banyak dibanding tahun 2018 yaitu 7 berbanding 3.
2. Belanja modal peralatan dan fasilitas kantor berupa meubeuler diseminasi, meubeuler kantor, dan meubeuler teater dan peralatan pengolahan data.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11
Jumlah Belanja Kotor	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp955.311.537,00 dan Rp494.701.750,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 93,11% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pagu belanja modal tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2018 yaitu dari Rp500.000.000 menjadi Rp965.000.000
2. Terdapat belanja peralatan dan fasilitas berupa meubeuler diseminasi, meubeuler kantor, meubeuler teater, peralatan pengolahan data dan alat pasca panen. Perbandingan belanja modal dapat dilihat pada table berikut:

No	Belanja Modal 2019	Nilai	Belanja Modal 2018	Nilai
1	Peralatan dan Fasilitas Kantor	634.681.300		
2	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (CCTV)	19.900.000	Peralatan kantor, perangkat pengolahan data dan komunikasi serta peralatan pertanian	193.500.000
3	Peralatan Pengolah data	48.268.636	Sound system dan wireless	54.480.000
4	Meubeuler Laboratorium	48.809.864	Meubeuler BPTP Kepri	188.936.750

	dan Diseminasi			
5	Peralatan Multimedia	25.404.545		
6	Meubeuler Laboratorium Pasca Panen	42.525.000		
7	Meubeuler Teater	129.907.192		
Total		955.311.537		436.916.750

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11
Jumlah Belanja Kotor	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	955.311.537,00	494.701.750,00	93,11

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.494.200,00 dan Rp22.128.300,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	932.200,00	2.118.300,00
Bahan Baku	24.562.000,00	20.010.000,00
Jumlah	25.494.200,00	22.128.300,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.568.076.000,00 dan Rp4.568.076.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.992.659.580,00 dan Rp2.960.223.243,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.960.223.243,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	314.815.237,00
Transfer Masuk	77.124.800,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	640.496.300,00
Saldo per 31 Desember 2019	3.992.659.580,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-2.475.388.557,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.517.271.023,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Belanja modal peralatan dan fasilitas kantor berupa CCTV dan Alat Laboratorium Pasca Panen
2. Belanja modal meubeuler laboratorium pasca panen, meubeuler laboratorium dan diseminasi, dan meubeuler teater.
3. Belanja modal peralatan multimedia, dan peralatan pengolah data.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.556.368.860,00 dan Rp8.556.368.860,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp47.232.825,00 dan Rp47.232.825,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.280.000,00 dan Rp22.280.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-2.925.650.488,00 dan Rp-2.257.179.147,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	3.992.659.580,00	-2.475.388.557,00	1.517.271.023,00
2.	Gedung dan Bangunan	8.556.368.860,00	-444.923.910,00	8.111.444.950,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.232.825,00	-5.338.021,00	41.894.804,00
4.	Aset Tetap Lainnya	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00
Akumulasi Penyusutan		12.618.541.265,00	-2.925.650.488,00	9.692.890.777,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.260.000,00 dan Rp11.260.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-15.263.750,00 dan Rp-12.327.500,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	11.260.000,00	-9.148.750,00	2.111.250,00
Akumulasi Penyusutan		17.375.000,00	-15.263.750,00	2.111.250,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.590.608,00 dan Rp3.140.100,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	962.108,00	1.062.200,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	628.500,00	2.077.900,00
Jumlah	1.590.608,00	3.140.100,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.286.981.619,00 dan Rp13.921.037.481,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp350.000,00 dan Rp10.500.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	10.080.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	350.000,00	420.000,00	-16,67
Jumlah	350.000,00	10.500.000,00	-96,67

Pada tahun anggaran 2019 perolehan PNBP menurun sebesar 96,67% disebabkan kegiatan Benih Sumber tidak panen pada tahun berjalan karena baru tanam di tanggal 9 November 2019. Sumber PNBP dari kegiatan kerja sama penelitian tidak ada karena tidak terdapat kerjasama di bidang penelitian pada tahun 2019. Dari pemanfaatan aset sesuai tufoksi juga tidak ada, karena mess tidak ada yang menempati. Dan perolehan PNBP umum dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan juga menurun karena pegawai yang menempati rumah dinas hanya tinggal sampai bulan September saja.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.818.508.700,00 dan Rp1.608.998.082,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.227.150.300,00	1.063.277.440,00	15,41

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.439,00	20.010,00	-2,85
Beban Tunj. Anak PNS	22.921.867,00	22.116.036,00	3,64
Beban Tunj. Beras PNS	60.497.620,00	55.056.360,00	9,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	192.350.000,00	207.740.000,00	-7,41
Beban Tunj. PPh PNS	7.340.500,00	7.545.450,00	-2,72
Beban Tunj. Struktural PNS	13.500.000,00	540.000,00	2.400,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.999.974,00	56.649.786,00	21,80
Beban Tunjangan Umum PNS	46.280.000,00	41.410.000,00	11,76
Beban Uang Lembur	0,00	6.496.000,00	-100,00
Beban Uang Makan PNS	179.449.000,00	148.147.000,00	21,13
Jumlah	1.818.508.700,00	1.608.998.082,00	13,02

Secara total beban belanja pegawai tahun 2019 meningkat sebesar 13.02%, hal ini dikarenakan terdapat penerimaan CPNS sebanyak 5 orang pada bulan Februari, pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 4 orang, kenaikan gaji berkala sebanyak 4 orang, terdapat kenaikan pangkat sebanyak 6 orang, menduduki jabatan fungsional 2 orang, kenaikan jabatan fungsional 1 orang, dan perubahan status kawin karena penambahan anak sebanyak 3 orang.

Menurunnya beban tunjangan fungsional karena pejabat yang menduduki structural harus melepaskan fungsionalnya sehingga realisasi tunjangan fungsional menurun.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp544.685.100,00 dan Rp954.384.550,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	439.283.500,00	742.574.300,00	-40,84
Beban Persediaan konsumsi	78.765.100,00	130.453.250,00	-39,62

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban persediaan lainnya	26.636.500,00	81.357.000,00	-67,26
Jumlah	544.685.100,00	954.384.550,00	-42,93

Secara pagu anggaran disbanding tahun sebelumnya lebih sedikit, sehingga realisasi belanja persediaan menyesuaikan anggaran yang ada.

Beban pemeliharaan senilai Rp.2.632.000 pada tahun 2019 merupakan pengelompokan akun persediaan dan tercatat di Neraca Percobaan, namun pada Laporan Operasional (LO) beban pemeliharaan tersebut tidak muncul di nilai beban persediaan, akan tetapi muncul di beban Pemeliharaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.133.349.737,00 dan Rp1.430.035.642,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	119.370.400,00	126.989.250,00	-6,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	271.671.341,00	533.568.159,00	-49,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	112.200.000,00	112.080.000,00	0,11
Beban Honor Output Kegiatan	50.100.000,00	71.350.000,00	-29,78
Beban Jasa Profesi	69.600.000,00	66.200.000,00	5,14
Beban Keperluan Perkantoran	375.945.122,00	367.708.827,00	2,24
Beban Langganan Air	17.520.900,00	21.338.100,00	-17,89
Beban Langganan Listrik	85.693.769,00	76.882.726,00	11,46
Beban Langganan Telepon	4.248.205,00	1.918.580,00	121,42
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Beban Sewa	24.000.000,00	49.000.000,00	-51,02
Jumlah	1.133.349.737,00	1.430.035.642,00	-20,75

Beban barang dan jasa dibanding tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 20,75%, penurunan terbesar terdapat pada beban sewa dikarenakan penggunaan

sewa pada tahun 2019 tidak banyak hanya sewa rumah untuk kepala. Yang berikutnya adalah beban barang non operasional lainnya menurun sebesar 49,08% dan beban honor output kegiatan menurun 29,78% dikarenakan entitas belanja non operasional kegiatan di lapangan menurun seperti berkurangnya UHL, pengiriman, bahan pendukung dan beban bahan. Sedangkan untuk beban langganan listrik meningkat sebesar 11,46% karena adanya penambahan daya, dan pengguna semakin banyak serta alat-alat perkantoran yang bertambah. Beban langganan telepon meningkat sebesar 121,42% dikarenakan penggunaan yang meningkat. Beban langganan air menurun sebesar 17,89% dikarenakan sudah adanya bangunan penampung air sebagai persediaan air untuk menyiram tanaman.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp175.431.732,00 dan Rp180.415.008,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.532.255,00	68.869.500,00	-1,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.267.477,00	110.843.508,00	-5,03
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.632.000,00	152.000,00	1.631,58
Beban Persediaan suku cadang	0,00	550.000,00	-100,00
Jumlah	175.431.732,00	180.415.008,00	-2,76

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan menurun 1,94% karena kebutuhan belanja untuk pemeliharaan lebih sedikit. Sedangkan beban pemeliharaan peralatan dan mesin juga menurun sebesar 5,03% dikarenakan tidak semua peralatan dan mesin dilakukan pemeliharaan.

Sama dengan penjelasan pada beban persediaan, dimana beban pemeliharaan sebagai beban persediaan tercatat di Neraca Percobaan namun di LO tidak tercatat di beban persediaan namun tercatat di beban pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp896.993.267,00 dan Rp1.026.479.473,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	891.743.267,00	953.745.473,00	-6,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	4.350.000,00	20,69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	6.600.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	61.784.000,00	-100,00
Jumlah	896.993.267,00	1.026.479.473,00	-12,61

Beban perjalanan biasa mengalami penurunan sebesar 12,61% dikarenakan intensitas perjalanan dinas ke luar kota menurun. Namun beban perjalanan dinas dalam kota terjadi kenaikan 20,69% karena intensitas perjalanan baik ke lapangan dalam kota maupun menghadiri undangan dalam kota.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp671.407.591,00 dan Rp583.828.277,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	1.528.750,00	1.528.750,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174.147.908,00	174.546.708,00	-0,23
Beban Penyusutan Jaringan	1.214.342,00	1.214.342,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.407.500,00	1.407.500,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	493.109.091,00	405.130.977,00	21,72
Jumlah	671.407.591,00	583.828.277,00	15,00

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-321.350.000,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.105.000,00	0,00	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	-171.553.750,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	130.000,00	182.190.000,00	-99,93
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	321.350.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	370.024,00	0,00	0,00
Jumlah	-604.976,00	-119.150.000,00	-99,49

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.921.037.481,00 dan Rp14.150.304.608,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-5.240.631.103,00 dan Rp-5.892.791.032,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp398.800,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp398.800,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.606.575.241,00 dan Rp5.663.125.105,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.530.170.465,00
Diterima dari Entitas Lain	-720.024,00
Transfer Masuk	77.124.800,00
Jumlah	5.606.575.241,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-720.024,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.530.170.465,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.124.800,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	77.124.800,00
Jumlah			77.124.800,00

Transfer masuk merupakan peralatan Konstratani kegiatan prioritas Kementerian Pertanian yang berasal dari Sekretariat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 09 Desember 2019.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.286.981.619,00 dan Rp13.921.037.481,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Pada tanggal 17 September terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran semula Dr. Ir. Mizu Istianto, MP menjadi Dr. Ir. Sugeng Widodo, MP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 662/KPTS/KP.230/A/9/2019 pada tanggal 19 September 2019.
2. Terdapat pegawai mutasi pindah 1 orang aatas nama Suwandi, A.Md
3. Pagu minus pada belanja pegawai, pada akhir September sampai awal bulan Oktober sudah dilakukan penyusunan dan usulan revisi.
4. Atas Catatan Hasil Reviu Itjen pada Workshop penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2019 telah ditindaklanjuti diantaranya:

No	CHR Triwulan III 2019	Tindak Lanjut
1	Mengusulkan PSP BMN senilai Rp6.345.303.597 ke KPKNL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah PSP aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp.478.321.700 2. Sudah diusulkan dan sedang proses senilai Rp. 1.454.763.210
2	Melakukan Inventarisasi ulang terhadap aset BMN dengan kondisi yang rusak berat untuk dilakukan proses penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan inventarisasi bahwa masih terdapat aset yang rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan kantor dan dalam tahap pengusulan ke pengguna barang.
3	Melakukan koordinasi dengan Badan Litbang Pertanian untuk penghapusan persediaan dalam kondisi rusak atau using senilai Rp171.553.750 yang berupa bibit karet, kelapa, dan lada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat verifikasi penyusunan laporan keuangan triwulan III, oleh Badan Litbang diminta untuk membuat SK Tim Penghapusan atas persediaan yang rusak atau using. 2. Sudah dilakukan penghapusan berdasarkan SK Kepala BPTP Kepri Nomor:B-1174/Kpts/PL.320/H.12.32/11/2019 tanggal 04 November 2019

5. Terdapat selisih beban persediaan di LO dengan realisasi persediaan sebesar Rp1.105.000,00, selisih tersebut merupakan beban penyesuaian pada bahan baku dan persediaan lainnya. Terdapat beban penyesuaian karena harga perolehan pada belanja terakhir terdapat perbedaan dengan harga awal pada jenis barang persediaan yang sama, sehingga selisih dari harga tersebut menjadi beban penyesuaian.